

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gerakan feminisme telah menjadi isu yang hangat diperbincangkan di dunia setelah kemunculannya di Barat sekitar abad ke-18. Tentu saja, hal ini berkaitan dengan pembagian peran berbasis gender pada hampir seluruh bidang masyarakat di dunia yang cenderung menempatkan perempuan di posisi inferior. Sejak Jepang membuka diri pada dunia internasional di zaman Meiji, negeri yang selama 260 tahun menjalankan sistem feodal ini berusaha untuk menyamakan kedudukannya dengan Barat di segala aspek sosial serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Bersamaan dengan itu, masuklah pemikiran-pemikiran baru, suatu produk yang terus berkembang sejak zaman pencerahan ‘enlightment’ Barat, dengan membawa wacana tentang liberalisme, universalitas, kesetaraan gender, dan lainnya yang mampu mengubah pandangan masyarakat umum di Barat ketika itu. Walaupun begitu, pada kasus Jepang, hal ini menjadi tidak begitu mudah karena struktur sosial serta kebudayaan yang jauh berbeda dengan Barat.

Dalam pandangan bangsa Barat, Jepang seringkali dianggap sebagai bangsa yang unik. Asumsi ‘Jepang Unik’ sesungguhnya sudah dianggap kurang relevan untuk menggambarkan negara Jepang, mengingat asumsi tersebut tumbuh karena kurangnya pengetahuan bangsa Barat sendiri saat itu, dan perspektif Barat yang seringkali mengatasnamakan universalitas. Tiap kebudayaan memiliki keunikan tersendiri. Budaya merujuk pada aspek-aspek nilai di dalam sistem kehidupan, yakni untuk membentuk konsep mengenai apa yang diinginkan dalam kehidupan, atau dengan kata lain konsep yang diterima secara umum oleh masyarakat. Termasuk di dalamnya hal-hal mengenai kejujuran, kebaikan, dan keindahan dalam suatu tatanan masyarakat. Budaya yang berlaku dalam masyarakat tertentu tidak mudah untuk diubah, karena hal tersebut sudah melalui rangkaian proses sejarah, dan menjadi manifestasi dari etos serta karakter dari masyarakat tersebut.

Pada struktur masyarakat Jepang di masa sebelum Perang, seperti yang diungkapkan Nakane (1970), Jepang merupakan masyarakat yang terintegrasi, dengan struktur hierarki (vertikal) dan dominasi kaum laki-laki. Hal tersebut menyebabkan kekuasaan perempuan sangat jauh tertinggal dari laki-laki yang memegang peran dominan dalam masyarakat maupun organisasi. Kaum laki-laki yang menguasai organisasi-organisasi sentral di masyarakat semakin mempersempit ruang gerak perempuan di area publik. Bahkan pada masa kekuasaan klan-klan samurai, kebebasan untuk menikmati pengalaman di luar rumah merupakan hal yang sangat jarang bagi para perempuan Jepang.

Akan tetapi, tidak tepat apabila dikatakan operasi perempuan telah terjadi sejak masa pramodern di Jepang. Sebaliknya, dalam kurun waktu Jepang kuno, keluarga merupakan suatu unit produksi sama seperti reproduksi, dan sebagian besar perempuan Jepang bekerja di ladang-ladang milik keluarga atau dalam bisnis keluarga, sama halnya seperti bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga. Lebih jauh lagi, ibu tidak mengeluarkan sebagian besar waktunya untuk membesarkan anak, dan tidak pula dalam memberikan keputusan penting mengenai pendidikan bagi sang anak. Ibu mertua atau anak yang lebih tua yang mengambil alih peran tersebut ketika ayah mengerjakan otoritasnya dalam hal lain (Tipton, 2000: 210). Citra perempuan yang dikaitkan dengan pekerjaan domestik, mulai menguat dalam pola pikir masyarakat Jepang pada masa kekuasaan kaum samurai, khususnya di era kekuasaan Tokugawa (1603-1867) (Wulandari, 1992: 13).

Setelah memasuki era Meiji, konsep negara-keluarga menjadi semakin meluas, dan pandangan ideal samurai mengenai *ryoosaikenbo* ---istri yang baik, ibu yang bijaksana--- berpenetrasi ke dalam masyarakat kelas menengah ke bawah. Akibatnya, pola pikir yang menempatkan peran perempuan di wilayah domestik, menjadi semakin meluas. Berikut akan diberikan gambaran umum mengenai perkembangan konstruksi sosial masyarakat Jepang terhadap perempuan dan gambaran umum peran perempuan Jepang dalam bidang politik sebelum Perang Dunia II.

1.1.1 Perkembangan Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan di Jepang

Menurut ahli-ahli kejeperangan, opresi terhadap perempuan Jepang justru tidak terjadi sejak awal periode sejarah di Jepang. Sistem kepercayaan pada Periode Jepang Kuno (300SM-784M) bahkan memberikan penghormatan tertinggi pada sosok perempuan, yang diwujudkan dalam sistem kepercayaan yang memuja dewi matahari; *Amaterasu* sebagai dewa tertinggi. Mitos mengenai dewi matahari ini masih terus berkembang pada masa kekuasaan kerajaan Yamato (250M-587M). Di masa ini, kerajaan Yamato dipimpin oleh seorang Raja atau Ratu (*Ookimi*), dimana kekuasaannya diturunkan menurut pertalian darah. Baik Raja maupun Ratu dipercaya masyarakat sebagai keturunan dari *Amaterasu*, yang merupakan dewa tertinggi dalam sistem kepercayaan masyarakat pada masa itu (Brown, 1993: 1-2). Menurut Reischauer (1980), beberapa naskah Cina menceritakan bahwa kepemimpinan perempuan umumnya berlangsung pada abad ke-3, tetapi ada pula Ratu yang memerintah sampai akhir abad ke-8 (Wulandari, 1992: 10).

Salah satu naskah tersebut, memberikan informasi sebagai berikut:

“The country formerly had a man as a ruler. For some seventy or eighty years after that, there were disturbances and welfare. There upon the people agreed upon a women for their ruler. Here name was Pimiko. She occupied herself with magic and sorcery, bewitching the people. Though mature in age, she remained unmarried. She had a younger brothers who assisted her in ruling the country. After she became the ruler, there were very few who saw her. She had one thousand women as attendants, but only one man. He served her food and drink and acted as a medium of communication. She resided in a palace surrounded by towers and stockades, with armed guards in a state of constant vigilance.” (Mason and Caiger, 1983: 10)

Data tersebut memberi gambaran bahwa Ratu Pimiko ---atau dalam sejarah Jepang disebut Ratu Himiko--- (107M-247M) adalah semacam pendeta perempuan yang menduduki jabatan puncak. Setelah Ratu Himiko, masih dikenal lagi beberapa raja-raja perempuan. Raja perempuan terakhir adalah Ratu Kooken (757M-759M). Diduga pada periode dimana raja-raja perempuan memerintah, hukum kekerabatan yang dianut adalah sistem matriarkal (Wulandari, 1992: 10). Hal tersebut memberi gambaran bahwa kedudukan perempuan Jepang pada masa itu sesungguhnya tidak di

bawah dominasi laki-laki, bahkan perempuan masih diberi kewenangan untuk menduduki jabatan politis yang sangat strategis, yakni sebagai Ratu yang memimpin kerajaan.

Memasuki periode Heian (800M-1200M), meskipun tidak dikenal lagi raja-raja perempuan, tetapi bangsawan Fujiwara yang secara *de facto* menguasai roda pemerintahan, menggunakan anak-anak perempuannya dengan menikahkan mereka pada Kaisar. Sehingga secara tidak langsung anak gadis menjadi aset yang memegang peranan penting untuk menjaga keberlangsungan kekuasaan Fujiwara. Pada masa ini, kaum perempuan masih memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri, seperti dalam karya-karya sastra agung, yang salah satunya berjudul *Genji Monogatari* dan *Makura no Soshi*, karya sastrawati Murasaki Shikibu dan Sei Shoonagon. Meskipun pada periode ini, perempuan yang terlihat produktif hanya menjangkau kalangan bangsawan saja, tetapi setidaknya hal ini menandakan bahwa pada periode Heian, kebebasan perempuan Jepang belum benar-benar mati (Wulandari, 1992: 11).

Pada awal zaman pertengahan (*Chuuse*) tahun 1180, di bawah kekuasaan Kamakura bakufu¹ (1180-1333), Buddhisme² berkembang pesat di Jepang dan membawa serta konsep sistem keluarga patriarkal³ ke dalam masyarakat Jepang (Yamamura, 1990: 544). Pemerintah Kamakura bakufu tidak memiliki otoritas sepenuhnya atas rakyat, dan masih berbagi kekuasaan dengan otoritas sipil dari *Tenno* ---Kaisar--- serta lembaga hukum. Namun bersamaan dengan berdirinya Muromachi bakufu (1336-1597), kaum samurai yang memiliki posisi tertinggi di masyarakat, mendapatkan otoritas penuh atas warga sipil (Yamamura, 1990: 1). Pada masa ini terjadi perubahan institusional dimana pemerintahan militer (sistem bakufu) serta aristokrasi militer (samurai) menjadi aturan utama di dalam sistem pemerintahan, dan sistem 'kelas' diperkenalkan di Jepang (Yamamura, 1990: 175).

Pada masa terbentuknya kekuasaan kaum samurai, kebebasan perempuan Jepang sedikit demi sedikit berkurang seiring dengan diberlakukannya etika

¹ *Bakufu* merupakan sistem pemerintahan militer di Jepang.

² Ajaran agama yang menyebar dari India ke Cina sekitar 400SM, dan disebarkan ke wilayah Jepang dari Cina melalui semenanjung Korea pada pertengahan abad ke-6 (Yamamura 1990: 544).

³ Konsep dalam hubungan keluarga dimana garis keturunan diturunkan melalui pihak ayah

Konfusianis⁴, yang merupakan ajaran etika dari daratan Cina yang telah berpenetrasi ke dalam masyarakat Jepang sejak tahun 587M (Brown, 1993: xvi). Sebagai implikasinya, muncul beragam bentuk aturan sosial seperti ‘tiga kepatuhan perempuan’ ---patuh pada ayah selagi muda, patuh pada suami setelah menjadi istri, dan patuh kepada anak di masa tua---, serta *gorin gojo* ---lima hubungan besar dan dasar-dasar tatanan moral Konfusianis---⁵. Sistem keluarga patriarkal yang diusung oleh Budhisme berkembang bersamaan dengan etika Konfusianis (Brown, 1993:xvi), dan semakin memperkuat dominasi laki-laki di dalam masyarakat. Paulson (1976) mengatakan bahwa ajaran Konfusianis juga memberlakukan hukum yang diskriminatif terhadap kaum perempuan, yang dikenal dengan *Confusian Shichikojo*⁶

Pada periode Edo yang dikuasai *shogun* Tokugawa (1603-1867), Jepang memberlakukan ‘politik pintu tertutup’ (*Sakoku*). Jepang semakin menerapkan ajaran Konfusianis dalam negaranya untuk menjaga keberlangsungan serta kedamaian di wilayahnya. Agama Kristen pun dilarang masuk, karena dianggap membahayakan tatanan masyarakat yang telah diatur menurut sistem kelas. Doktrin agama Kristen yang menyatakan bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki derajat yang sama, tidak dapat diterima oleh *shogun* Tokugawa (Wulandari, 1992: 13). Saat Jepang mulai memodernisasikan negaranya tahun 1868 bersamaan dengan Restorasi Meiji, Jepang telah berada dalam kekuasaan feodal *samurai*, selama sekitar tujuh abad. Pada masa yang hampir bersamaan, wanita di Barat telah menunjukkan eksistensinya di dunia politik, seperti Ratu Elizabeth I, Mary dari Skotlandia, Isabella dari Spanyol, dan sebagainya (Pharr, 1981: 16).

⁴ Etika Konfusianis akan dijelaskan dalam Bab II.

⁵ Konsep hubungan antara; suami-istri, ayah-anak laki-laki, kakak-adik, atasan-bawahan, antar teman, dimana dalam masing-masing dual hubungan tersebut, salah satu memiliki posisi yang lebih dominan, dan merupakan gambaran hubungan hierarki dalam sistem masyarakat Jepang. Selain itu, konsep dasar-dasar moral Konfusianis mengandung nilai-nilai tanggung jawab, kewajiban, penghormatan, pengetahuan dan akal sehat, serta kepercayaan.

⁶ *Confusian Shichikojo* atau disebut juga *Sichi Sutsu* ---tujuh alasan suami untuk menceraikan istri---, meliputi; 1. Tidak mampu untuk melahirkan anak laki-laki. 2. Melakukan gossip. 3. Berbuat cabul. 4. Cemburu. 5. Mencuri harta suaminya. 6. Tidak patuh kepada mertuanya. 7. Sakit (Endah Wulandari, 1992: 12). Aturan ini tentunya semakin menguatkan posisi marginal perempuan dalam masyarakat Jepang.

Pada masa Meiji (1868-1912), dengan Kaisar sebagai kepala negara, Jepang menghapuskan feodalisme dan memperkenalkan sistem baru; sistem kapitalis, yang diadaptasi dari sistem negara-negara Barat. Untuk mengejar ketertinggalan dari Barat, dikeluarkan Konstitusi Meiji pada abad ke-19 (1889) dan Kode Sipil (1898). Perempuan sebagai pion utama yang mengatur rumah tangga, mendapat justifikasi legal dari sisi hukum, dan ditempatkan di luar masyarakat hierarkis atau dapat dikatakan dimarginalkan (Fujieda, 1995: 4-5). Gambaran ideal mengenai perempuan di era Meiji sesungguhnya diterjemahkan dari literatur-literatur sebelum masa Meiji, khususnya *Onna Shisho* ---Empat Pedoman Perempuan---, yang merupakan koleksi buku terjemahan Cina yang membahas mengenai etika dan tata cara bersikap bagi perempuan. Gambaran mengenai perempuan ini lahir pada masa feodalisme, dan semakin menggarisbawahi dominasi laki-laki di masyarakat, dimana laki-laki dikaitkan dengan surga sedangkan perempuan dikaitkan dengan dunia. Taat kepada laki-laki, lembut, suci, bersih, sopan dan selalu dikaitkan dengan pekerjaan domestik dianggap sebagai takdir kaum perempuan. Salah satu hasil dari *Onna Shisho* adalah *Onna Daigaku*⁷, sebuah buku berisi doktrin yang ditulis oleh Kaibara Ekiken pada zaman Tokugawa (1603-1868). *Onna Daigaku* menjadi semacam aturan yang absolut mengenai etiket dan pedoman bagi perempuan (Fujiwara, 1966: vii).

Tidak hanya menjadi subjek kekuasaan Kaisar, di masa Meiji perempuan juga menjadi subjek 'sang ayah' dalam konsep patriarki di dalam keluarga, yang menjadi dasar dari relasi sosial secara umum. Struktur institusional ini didukung oleh ideologi pada masa itu, dimana kaum laki-laki mengabdikan pada negara melalui kegiatan kemiliteran, sedangkan pengabdian perempuan adalah mengabdikan pada suami melalui

⁷ Menurut Yoshimi Kaneko (1988), *Onna Daigaku* merupakan judul buku yang ditulis pada tahun 1716 oleh Kaibara Ekiken, yang pada masanya merupakan salah satu penulis tentang pendidikan yang cukup terkenal. Buku tersebut berisi tentang pendidikan moral perempuan yang menunjang keluarga dalam sistem feodal. *Onna Daigaku* merupakan salah satu buku yang paling berpengaruh dalam mendefinisikan peranan ideal kaum perempuan yang berakar dari kepercayaan Konfusianisme. Buku ini ditulis sebagai pedoman perihal tingkah laku perempuan, kesemuanya merupakan penekanan kepercayaan bahwa pada hakekatnya perempuan berderajat lebih rendah daripada laki-laki, sehingga peranan perempuan diarahkan untuk mengabdikan kepada laki-laki. Kaum perempuan baru mencapai sekedar kedudukan berderajat tertentu sebagai kaum ibu; dan ini bukan sebagai pengakuan terhadap hak mereka sebagai perempuan, tetapi lebih banyak sebagai akibat penghargaan bagi fungsi sosial mereka dalam melahirkan serta membesarkan para pengganti kepala keluarga (Endah Wulandari, 2006: 9-10).

sistem keluarga patriarkal. Struktur masyarakat berdasarkan Konstitusi Meiji berlaku secara efektif sampai akhir masa Perang Dunia II (Mackie, 2003: 6).

Dapat dikatakan meskipun di era Meiji sistem kelas dihapuskan dan modernisasi mulai berkembang di Jepang, namun kultur samurai berpenetrasi ke dalam struktur sosial masyarakat, sehingga perempuan Jepang semakin kehilangan kekuatan dan kesetaraannya (Iwao, 1993: 5).

Seiring dengan modernisasi dan sentralisasi yang berkembang pada era Meiji, dominasi kaum laki-laki semakin meningkat, dan struktur masyarakat hierarkis semakin mengakar. Sebagai akibatnya, perempuan semakin kehilangan kekuasaan, dan hak-hak perempuan untuk aktif di ruang publik semakin berkurang. Hal ini kemudian melatarbelakangi munculnya gerakan-gerakan yang mengusung hak-hak perempuan di era Meiji.

1.1.2 Gambaran Umum Perempuan Jepang dalam Bidang Politik

Pada masa Meiji, dengan adanya keterbukaan terhadap dunia internasional, berita mengenai perkembangan gerakan feminis di Barat pada akhirnya sampai di Jepang, dan ide-ide maupun ideologi Barat semakin populer. Sebagai hasilnya, beberapa suara yang mengusung hak-hak perempuan mulai muncul ke permukaan. Kaum *Suffragis* ---kaum yang memperjuangkan hak pilih bagi perempuan--- menjadi isu yang hangat di awal tahun 1876. Namun, apabila gerakan kaum *Suffragis* yang muncul di Jepang pada dekade awal abad 20 ini dibandingkan dengan gerakan-gerakan perempuan di Barat, dukungan yang diberikan masyarakat Jepang maupun peningkatan kesadaran kaum perempuan Jepang di masa tersebut masih terbilang rendah (Pharr 1981: 17).

Seperti yang dikemukakan Pharr (1981), di masa itu pula, segelintir perempuan Jepang bergabung dengan gerakan hak-hak perempuan (*Jiyuu Minken Undou*). Tokoh perempuan *Suffragis* pertama di Jepang, Kishida Toshiko (1863-1901) menjadi juru kampanye gerakan ini, dan mengkombinasikan hak-hak demokrasi dengan hak-hak perempuan. Di tahun 1880, beberapa dari faksi liberal mendukung gerakan *Suffragis* perempuan Jepang. Pada masa Meiji, sebenarnya ada

beberapa tokoh laki-laki yang menyoal tentang masalah perempuan. Salah satunya adalah Mori Arinori (1847-1889), dimana atas pengaruhnya, pemerintah Jepang masa itu mengirimkan lima perempuan muda ke Amerika untuk kepentingan pendidikan pada tahun 1871.

Selain Mori Arinori, Fukuzawa Yukichi (1835-1901), yang juga merupakan tokoh pemimpin liberal, dengan pandangan yang dipengaruhi pengalaman hidupnya di dunia Barat, menjadi salah seorang tokoh penting dalam peningkatan status perempuan (Pharr, 1981: 17). Fukuzawa dan para pelajar yang dikirim ke luar negeri untuk menjalankan misi pendidikan dari pemerintah Jepang, banyak mendapat pengaruh dari pola pikir masyarakat Barat⁸ (Fujiwara, 1966: viii).

Berbagai gerakan yang memperjuangkan kebebasan perempuan ini memberikan harapan yang lebih baik terhadap perempuan di masa itu, tetapi bagi populasi yang lebih besar, tujuan dari gerakan ini dianggap tidak realistis. Sejalan dengan yang dikemukakan Pharr (1981), masyarakat Meiji mereproduksi adat dan kebiasaan keluarga patriarkal. Kode Hukum Sipil yang baru diperkenalkan pada tahun 1890 memosisikan negara di bawah kekuasaan sistem Kekaisaran dan tidak memberi tanggapan terhadap ide-ide revolusioner, khususnya mengenai kesetaraan gender. Bahkan pemerintah mempromosikan gambaran perempuan ideal melalui Meiji *Onna Daigaku* yang merupakan pengulangan dari *Onna Daigaku* dekade sebelumnya. Walaupun tahun 1890 Konstitusi Meiji Baru disahkan, dan di dalamnya

⁸ Fukuzawa semakin peduli dengan posisi perempuan di dalam masyarakat yang sedang bertransformasi. Fukuzawa memberi kritik tajam terhadap dominasi laki-laki dalam masyarakat Konfusianis. Ia juga percaya pada doktrin yang cukup radikal pada masa itu: teori hak asasi manusia yang berdasar pada kesetaraan gender. Fukuzawa aktif menyuarakan pentingnya pendidikan bagi perempuan, dan perkembangan posisi perempuan di masyarakat. Yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi pemikiran Fukuzawa dan kepercayaannya terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah pemikiran Barat, yang diobservasi olehnya pada saat ia mengunjungi Eropa dan AS, serta pemikiran John Stuart Mill melalui buku *The Subjection of Women*, dan Francis Wayland dengan bukunya *Elements of Moral Science* (Fujiwara, 1966: xiii). Ekspresi idealistik dari Fukuzawa di waktu muda terlihat dalam tulisan-tulisannya tahun 1870: *Nakatsu Ryuubetsu no Sho* (Kata-kata yang Tertinggal dalam *Nakatsu*) serta *Gakumon no Susume*. Diantara tahun 1874 dan 1875, *Meiroku Zasshi*, suatu majalah kaum Pencerahan, menerbitkan beberapa tulisan mengenai perempuan, seperti: *On Wives and Concubines* oleh Mori Arinori, *Creating Good Mothers* oleh Nakamura Masanao serta *On Destroying Prostitution* oleh Tsuda Mamichi. Dalam jurnal ini Fukuzawa menulis mengenai *The Equal Numbers of Men and Women* (Keiko Fujiwara, 1966: viii).

telah disiapkan bentuk pemerintahan parlementer Jepang, tetapi perempuan tidak diikutsertakan di dalamnya. Hak berpolitik perempuan bahkan tidak mendapatkan justifikasi hukum.

Meskipun demikian, perjuangan kaum feminis Jepang tetap berlanjut. Kelompok pejuang hak-hak perempuan yang terpenting pada awal tahun 1900-an di Jepang adalah kelompok *Bluestockings Society (Seitousha)* yang berdiri tahun 1911. Kelompok bertujuan untuk menyediakan sarana untuk mempublikasikan tulisan perempuan Jepang melalui publikasi majalah *Seitou*. Majalah *Seitou* menyelenggarakan forum untuk mendiskusikan subjek-subjek yang dianggap tabu seperti seksualitas, kontrol reproduksi, dan prostitusi, dalam konteks merayakan kebebasan berkreasi perempuan (Mackie, 2003: 6). Selanjutnya, majalah ini menjadi sarana kritik kaum feminis Jepang, walau pada akhirnya dilarang beredar oleh pemerintah pada tahun 1916. Pendirinya, Hiratsuka Raichou (1886-1971), menjadi salah satu pimpinan *Suffragis* dan feminis terkemuka di Jepang sebelum Perang Dunia berlangsung. Ia dan Ichikawa Fusae (1893-...) mendirikan Asosiasi Perempuan Baru (*Shin Fujin Kyokai*) pada tahun 1919 untuk memperjuangkan hak politik bagi kaum perempuan. Target mereka adalah Undang-Undang Keamanan Umum ---*Peace Preservation Law* atau *Chian Keisatsu Hou*--- yang mempersulit kelompok hak-hak perempuan untuk mengadakan pertemuan, berbicara mengenai politik, dan turut serta dalam organisasi politik. Sebagai hasil dari perjuangan *Seitousha*, pada tahun 1922, Hukum Keamanan Umum akhirnya direvisi kembali dan memberikan hak bagi perempuan untuk datang ke pertemuan politik (Pharr, 1981: 18-19). Akan tetapi, setelah laki-laki dewasa diperbolehkan untuk memilih pada tahun 1925 pun, hak perempuan untuk turut serta dalam partai politik masih dipinggirkan (Mackie, 2003: 6).

Tahun 1928-1931 disebut Ichikawa sebagai ‘periode harapan’, karena adanya modifikasi Undang-Undang mengenai hak warga negara ---khususnya perempuan--- oleh Majelis Rendah Parlemen Kekaisaran. Namun, Insiden Manchuria di tahun 1931 meningkatkan fokus pemerintah terhadap bidang kemiliteran, dan gerakan feminis pun mengalami penurunan. Dari akhir tahun 1930an hingga tahun 1945, perempuan

Jepang dikejutkan dengan kekuatan patriarki yang lebih besar: kebijakan mobilisasi nasional, ketidakstabilan ekonomi karena perang, serta sikap patriarkal pemerintah di masa perang (Pharr, 1981: 20-21).

Setelah Perang Dunia II berakhir, Jepang berada di bawah pendudukan Okupasi Amerika selama kurang lebih tujuh tahun (1945-1952). Pada masa ini, di bawah kepemimpinan jenderal Douglas MacArthur sebagai Komandan Tertinggi Pasukan Sekutu (*Supreme Commander for The Allied Powers*), diadakan beberapa perubahan dalam Konstitusi Jepang, termasuk yang menyangkut perempuan, seperti pemberian hak suara, hak menduduki jabatan politik, kebebasan melakukan pertemuan politik, kebebasan berbicara, serta memeluk agama (Pujiastuti, 2001: 11). Pada 10 April 1946, perempuan Jepang untuk pertama kalinya dapat melakukan pemungutan suara dan dapat menduduki jabatan politik.

Sesungguhnya hak perempuan untuk memilih dan dipilih merupakan hal yang diperjuangkan para feminis Jepang sejak tahun 1890. Perjuangan ini membuahkan hasil pada tahun 1922, dengan diperbolehkannya perempuan untuk mengikuti perkumpulan politik. Namun perjuangan utama dari kaum feminis, khususnya gerakan *Suffragis*, justru didapatkan sebagai produk dari kekalahan Jepang terhadap Amerika.

Politik memang dianggap oleh perempuan Jepang pada umumnya sebagai bentuk pekerjaan yang 'kotor', sehingga kebanyakan dari para perempuan memilih untuk bersikap pasif (Iwao, 1993: 214). Yang menjadi permasalahan adalah, *gap* antara peran laki-laki dan perempuan dalam kancah perpolitikan di Jepang dinilai sangat besar. Peran pasif perempuan dalam politik di Jepang juga berkaitan dengan sistem pemerintahan yang telah dibangun sejak era Meiji, yang walaupun tidak secara spesifik menyebutkan hanya laki-laki yang dapat memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat, tetapi sistem tersebut dikontrol oleh kaum lelaki.⁹

⁹ Pada pemilu pertama di tahun 1890, hanya laki-laki ---yang membayar pajak di atas 15 Yen--- yang dapat mengikuti Pemilu, dan perempuan Jepang baru mendapatkan hak untuk memilih dalam Pemilu tahun 1945. Bahkan setengah abad setelahnya, sistem legislatif di Jepang masih cenderung menutup pintunya untuk perempuan (Sumiko Iwao, 1993: 217).

Jepang dianggap sebagai model yang ideal untuk membahas peran perempuan dalam politik nasional, karena Jepang dikatakan sebagai negara industri maju dan setara dengan Barat, sekaligus sebagai negara yang masih memegang terminologi feodal dalam berbagai struktur sosial maupun kebudayaannya. Gerakan feminisme Barat yang menyoal tentang kesetaraan relasi gender juga turut memberi masukan pada pola pikir para perempuan Jepang, yang masih memperjuangkan penyetaraan kesempatan hingga saat ini.

Berpijak pada kondisi masyarakat Jepang yang demikian, skripsi ini akan menganalisa bagaimana peran perempuan dalam politik nasional Jepang, khususnya pada masa Jepang kontemporer tahun 1980-1990, dengan menggunakan perspektif feminisme posmodern. Penggunaan perspektif feminisme posmodern sebagai landasan teori dalam skripsi ini terutama didasari oleh pertimbangan bahwa perspektif ini merupakan pendekatan yang mengkaji peran perempuan di ruang publik yang dianalisis berdasarkan konsep ‘tatanan simbolik’. Salah seorang pemikir posmodern, Jacques Lacan, beranggapan bahwa masyarakat, sebagai sistem hubungan yang sudah ada sebelum kehadiran kita, diatur oleh rangkaian tanda, peran, dan ritual yang disebut sebagai ‘tatanan simbolik’ (Lacan, 1989: 64-66). Proses yang terjadi dari kebiasaan, menjadi adat, dan kemudian dikatakan sebagai tradisi yang diterima oleh masyarakat umum di suatu daerah, adalah proses yang panjang dan telah terjadi sebelum eksistensi kita di dunia, sehingga hal tersebut tentu tidak dapat serta merta diubah oleh seseorang. Lacan (1989) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pola pikir masyarakat, terdiri dari rangkaian tanda, peran, dan ritual yang tidak saling berhubungan dan membentuk persepsi umum dari individu maupun kelompok masyarakat tertentu.

‘Tatanan simbolik’ mengatur masyarakat melalui pengaturan terhadap individu; sepanjang individu tersebut berbicara dalam bahasa dan ‘tatanan simbolik’ tersebut, serta menginternalisasi peran gender dan kelas yang terkandung di dalamnya (Lacan, 1989). Dengan demikian, teori yang dikemukakan oleh Lacan menekankan pentingnya peran ‘tatanan simbolik’ sebagai salah satu faktor dalam pembentukan konstruksi sosial dari satu individu di masyarakat. Mengingat *Grand Narrative* atau

‘narasi besar’ yang pada umumnya mengkonstruksi laki-laki sebagai pemimpin dalam masyarakat, posisi perempuan semakin terdesak ke dalam wilayah yang termarginalkan ---di luar tatanan simbolik---.

Seperti yang ditulis oleh Endah H. Wulandari (2008: 31), sejarah yang sudah lama ada melalui rangkaian konvensi yang sangat kuat, membuat perempuan tersisih dari arena politik melalui dikotomi peran publik dan domestik.

Dalam kasus Jepang, hal tersebut dapat dilihat dari salah satu bentuk aplikasi ‘tatanan simbolik’ dalam etika Konfusianis pada masa berkuasanya kaum samurai di Jepang. Di dalam ajaran Konfusianis, elemen-elemen anti feminis terlihat dalam aturan dan pencitraan terhadap perempuan yang seolah berada di bawah kuasa laki-laki, seperti dalam konsep *gorin gojo*, dan ‘tiga kepatuhan perempuan’. Hal ini semakin mempertegas ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki, serta membawa citra domestik perempuan dalam masyarakat Jepang yang selalu berada di dalam rumah mengurus keluarga, menyediakan segala kebutuhan rumah tangga seperti memasak, mencuci, merawat dan mendidik anak, mengurus mertua, dan lainnya. Pada perkembangannya, ‘tatanan simbolik’ yang membentuk citra perempuan Jepang seperti demikian ini terus berpenetrasi ke dalam pola pikir masyarakat Jepang. Keberadaan perempuan ‘di dalam rumah’ dianggap sebagai hal yang sesuai dengan peran perempuan, sehingga pada akhirnya mempersempit aktifitas perempuan di ruang publik, dan menjadikan peran perempuan di ruang publik termarginalkan.

Dengan menggunakan perspektif feminisme¹⁰, khususnya feminisme posmodern atau posfeminisme, yang melihat pengaruh ‘tatanan simbolik’ terhadap peran perempuan di ruang publik, maka kita dapat memahami kebudayaan serta latar belakang historis masyarakat Jepang yang turut serta membentuk konstruksi sosial perempuan Jepang. Penjelasan lebih lanjut mengenai ‘tatanan simbolik’ akan diberikan pada Bab II.

¹⁰ Feminisme merupakan gerakan pencarian hak-hak perempuan dan keadilan melalui kesetaraan gender. Dalam perkembangannya, feminisme mengalami pasang-surut dan dapat dikategorikan ke dalam beberapa Fase ---Gelombang Feminisme---. Penjelasan lebih lanjut mengenai feminisme akan diberikan pada Bab II.

Pemilihan perempuan Jepang kontemporer sebagai bahan kajian skripsi ini didasari pertimbangan bahwa perempuan Jepang, yang telah termarginalisasi khususnya setelah terbentuknya era kekuasaan feodal, terbilang ‘baru’ mendapatkan posisi dalam politik nasional pasca Perang Dunia II.

Negara Jepang yang telah memodernisasi diri sejak era Meiji ternyata memiliki konstruksi sosial yang kuat mengenai dominasi laki-laki dalam kehidupan publik, khususnya di bidang politik. Dalam politik nasional 1980-1990, konstruksi sosial terhadap perempuan memiliki pengaruh besar terhadap peran perempuan di politik nasional. Pada periode ini, memang terdapat peningkatan dalam jumlah partisipasi perempuan di Parlemen, tetapi tidak menjamin keberhasilan perempuan untuk mengambil keputusan vital maupun menempati posisi strategis di Parlemen. Dapat dikatakan pada periode ini peran perempuan di bidang politik masih dilatari berbagai kepentingan para politisi laki-laki.

Karena itu, kajian mengenai peran perempuan Jepang dalam politik diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan dan memperluas pandangan kita mengenai masyarakat Jepang, khususnya perempuan Jepang. Selain itu, dalam penelitian-penelitian Jepang konvensional, penggunaan ‘narasi besar’ mengenai homogenitas Jepang acapkali terjadi, karena sebagian besar peneliti kejepangan hanya melihat aspek yang dominan dalam masyarakat. Dengan demikian pemilihan perempuan Jepang kontemporer sebagai bahan kajian skripsi ini dapat memunculkan pandangan kaum yang dimarginalkan, atau bentuk ‘narasi kecil’ yang dalam kasus ini, adalah perempuan.

1.2 Pokok Permasalahan

Berangkat dari perspektif feminisme posmodern yang mengkaji bagaimana ‘tatanan simbolik’ dapat mempengaruhi konstruksi sosial masyarakat Jepang, khususnya mengenai perempuan, maka skripsi ini bermaksud mengangkat masalah peran perempuan dalam politik nasional Jepang kontemporer (1980-1990) yang dianalisis berdasarkan konsep ‘tatanan simbolik’ Jacques Lacan. Dengan demikian, skripsi ini bermaksud untuk mengangkat masalah peran perempuan Jepang dalam

bidang politik, yang dianalisa melalui perspektif feminisme posmodern, sebagai studi mengenai gerakan feminisme Jepang yang dianalisa berdasarkan ‘tatanan simbolik’ yang mempengaruhi peran perempuan di ruang publik.

1.3 Kerangka Teoritis

Pendekatan teoritis yang digunakan untuk menganalisa peran perempuan Jepang dalam politik nasional Jepang kontemporer (1980–1990) dalam skripsi ini adalah pendekatan feminisme posmodern, yang melihat bagaimana peran perempuan di ruang publik dengan menggunakan analisa berdasarkan konsep ‘tatanan simbolik’ Jacques Lacan.

Pada awalnya, para pemikir feminis Anglo-Amerika mengacukan ‘Feminisme Posmodern’ pada ‘Feminisme Perancis’, karena sebagian besar pendukung feminisme posmodern adalah warga negara Perancis atau perempuan yang tinggal di Perancis, terutama Paris. Feminis Inggris dan Amerika menyadari bahwa kesamaan yang dimiliki para ‘Feminis Perancis’ bukan semata-mata ‘keperancisannya’ mereka, tetapi perspektif filosofis mereka. Mereka kemudian menganggap feminisme Perancis sebagai feminisme posmodern.

Beberapa akar dari feminisme posmodern ditemukan dalam karya Simone de Beauvoir, yang mengajukan pertanyaan esensial dalam teori feminis, “Mengapa perempuan adalah *the second sex*?” atau jika ditulis dalam istilah posmodern “Mengapa perempuan Liyan?”. Mengapa perempuan berada di bawah, imanen, dan ditentukan takdirnya, sedangkan laki-laki dapat melompat menuju zona transendensi, zona kebebasan? (Tong, 1989: 286).

Feminis posmodern memanfaatkan pemahaman Beauvoir mengenai ke-Liyanan dan kemudian memutarbalikkannya. Perempuan masih merupakan Liyan, tetapi feminis posmodern justru mengambil manfaatnya. Kondisi ke-Liyanan memungkinkan perempuan untuk mengambil jarak dan mengkritisi norma, nilai, dan praktik-praktik yang dipaksakan oleh kebudayaan dominan (patriarki) terhadap semua orang, termasuk mereka yang hidup dalam lingkaran luarnya, yang dalam hal ini perempuan. Dapat dikatakan ke-Liyanan juga merupakan cara berpikir yang

memungkinkan adanya keterbukaan, pluralitas, keragaman dan perbedaan. Dengan demikian, salah satu kelebihan dari feminisme posmodern adalah melihat posisi Liyan perempuan sebagai suatu hal yang memiliki kelebihan dan kekurangan, tidak negatif secara keseluruhan.

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai peran perempuan Jepang dalam politik nasional Jepang kontemporer, khususnya pada tahun 1980 – 1990 yang dikaji dari perspektif feminisme posmodern sebagai suatu ‘tatanan simbolik’.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas empat Bab, pada Bab I diuraikan latar belakang, pokok permasalahan, kerangka teoritis, tujuan penulisan, sistematika penulisan, dan metode penulisan. Kemudian pada Bab II, dijelaskan konsep feminisme dan feminisme posmodern, khususnya mengenai ‘tatanan simbolik’ Jacques Lacan dan bagaimana aplikasi dari ‘tatanan simbolik’ dalam masyarakat Jepang. Selanjutnya pada Bab III, akan dibahas sistem politik Jepang, peran perempuan Jepang dalam politik, serta bagaimana peran perempuan dalam politik nasional Jepang kontemporer (1980-1990) yang dianalisis menurut ‘tatanan simbolik’. Dan akhirnya, pada Bab IV, akan diuraikan kesimpulan dari skripsi ini.

1.6 Metode Penulisan

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelaahan kepustakaan dengan menggunakan kajian perspektif feminisme posmodern. Bahan-bahan bacaan untuk penulisan skripsi ini diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Studi Jepang (PSJ) Universitas Indonesia, dan Perpustakaan *The Japan Foundation*.